

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT dimana atas berkatNya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang telah dapat diselesaikan.

Dimana dalam laporan ini menguraikan tentang pencapaian target indikator kinerja sasaran yang didukung oleh beberapa Program dan kegiatan pada Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang selama Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2017 yang mengacu kepada Penetapan Kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2017.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan masukan atau kontribusi bagi penyelesaian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang ini, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga Allah SWT dapat membalasnya dan harapan kami laporan ini bermanfaat bagi semua pihak, Amin.

Padang Panjang, 12 Januari 2017

**CAMAT PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG**

**DONI RAHMAN, S.Pd. I
NIP : 19780720 200604 1 012**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana mewajibkan setiap Kepala ODP untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) kepada Walikota sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengguna anggaran.

Dalam penyusunan dan pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini, Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 yang memuat, 4 (empat) Misi, 10 (sepuluh) tujuan, dan 5 (lima) sasaran dalam 5 tahun kedepan, dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja Tahunan.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV Anggaran 2017, maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang yang merupakan himpunan dari 20 (dua puluh) Program 49 (empat puluh sembilan) kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kota Padang Panjang tahun 2017.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini dibuat semoga bermanfaat untuk semua pihak dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
IKHTISAR EKSEKUTIF
DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Penjelasan Umum Organisasi
- D. Sistematika Penyusunan LKjIP

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- A. Visi dan Misi SKPD
- B. Tujuan dan Sasaran SKPD
- C. Penetapan Kinerja OPD Tahun 2017

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kehadiran Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai titik tolak penyelenggaraan azas Desentralisasi dan otonomi Daerah telah membawa serangkaian perubahan, baik pada tataran filosofis, pola dan fungsi utama penyelenggaraan daerah maupun paradigma yang digunakan. Dengan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) maka pemerintah memerlukan pengembangan dan penerapan sistem pemerintah yang akuntabel (Dapat dipertanggung-jawabkan) agar bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sehingga beberapa kebijakan diberlakukan seperti TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam Upaya menciptakan Pemerintah yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Akuntabel dimaksud diatas maka Pemerintah Kota Padang Panjang berusaha untuk ikut berperan aktif dalam upaya tersebut dimana dalam hal ini yang bekerja sama dengan segenap unsur unit kerja yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang secara sinergi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka unit Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur berupaya menyusun LAKIP Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2017 sebagai bagian integral dari siklus Laporan Pertanggungjawaban Walikota Padang Panjang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP 2017

Maksud dari Laporan ini adalah untuk menerapkan prinsip Akuntabilitas Kinerja pada Kecamatan Padang Panjang Timur dan sebagai bahan Evaluasi Pemerintah Kota guna melakukan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan untuk pelaksanaan Pemerintah yang akan datang secara berkesinambungan.

Tujuan dari laporan ini adalah untuk menyampaikan informasi dan laporan mengenai Kinerja Aparatur Kecamatan Padang Panjang Timur selama Tahun Anggaran 2017 berdasarkan indikator capaian kinerja yang terukur serta akuntabel, disamping itu penyusunan LAKIP Kecamatan Padang Panjang Timur juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Padang Panjang dan Penyusunan LKPJ Walikota Padang Panjang.

C. PENJELASAN UMUM ORGANISASI KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kota Padang Panjang bahwa Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat
 1. Subag Umum dan Kepegawaian
 2. Subag Keuangan,Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan
- c. Seksi Tata Pemerintahan, Ketertiban dan Ketentraman Umum
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Sosial
- f. Seksi Pelayanan.

Tugas Pokok dan Fungsi

a. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawsan, fasilitasi, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Selain tugas diatas Camat juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Kelurahan.

Fungsi Camat sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan kewenangan dari Walikota.
2. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman, ketertiban umum dan penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan.
3. Menyelenggarakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
4. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
5. Melaksanakan tugas Pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat Daerah atau Instansi lainnya.

b. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat di Kepala oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kecamatan yang meliputi urusan umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi:

- Pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian serta perlengkapan;
- Pengelolaan program administrasi keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.
- Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

❖ **Subag Keuangan, Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi**

Mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan, melakukan perencanaan dokumentasi kegiatan pembangunan Kecamatan, koordinasi penyusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumusan program rencana pembangunan, perhubungan, pembinaan pelaksanaan program, evaluasi program, mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing-masing seksi, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan.

❖ **Subag Umum dan Kepegawaian**

Meyelenggarakan program umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi hukum, kehumasan, penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pendidikan dan pelatihan, gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan kehumasan.

c. Seksi Tata Pemerintahan, Ketertiban dan Ketentraman Umum

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan di Kelurahan-kelurahan, urusan kesatuan bangsa, kependudukan, ketenagakerjaan dan pengelolaan Pendapatan Daerah di ruang lingkup Kecamatan Padang Panjang Timur, mengkoordinir kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Selain tugas pemerintahan juga seksi ini mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pengawasan dan penertiban bangunan, pembuangan air limbah, pengaliran drainase dan persampahan serta penanggulangan bencana.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanaman modal, tenaga kerja pariwisata, ketahanan pangan, pertanian, perdagangan, perindustrian, koperasi, UKM, pembinaan lomba kelurahan dan urusan pembangunan di kecamatan dan kelurahan.

e. Seksi Sosial

Mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan sosial dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan pendidikan, kebudayaan, Pemuda dan olah raga, sosial, kesehatan, pengendalian penduduk, KB, Perlindungan anak dan perempuan.

f. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok membantu camat dalam penyelenggaraan urusan pelayanan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup kecamatan dan kelurahan.

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKJ IP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Penjelasan Umum Organisasi
- D. Sistematika Penyusunan LKj IP

Bab II : PERENCANAAN KINERJA

- A. Visi-Misi OPD
- B. Tujuan dan Sasaran OPD
- C. Penetapan Kinerja OPD Tahun 2017

Bab III: AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

Bab IV : Penutup

- A. Kesimpulan.
- B. Saran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI DAN MISI KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

VISI

**“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KECAMATAN PADANG PANJANG
TIMUR YANG AMANAH, AMAN DAN SEJAHTERA “**

MISI

- ✓ Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang baik dan bersih.
- ✓ Mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat yang partisipatif dalam pembangunan.
- ✓ Mewujudkan pemberdayaan potensi kecamatan berbasis sumber daya lokal.
- ✓ Menciptakan, memelihara dan mengembangkan kondisi social politik dan Katibmas yang kondusif.

Penjabaran dari Visi Jangka Menengah Kecamatan Padang Panjang Timur, Yaitu :

1. Masyarakat Kecamatan Padang Panjang Timur yang Amanah adalah masyarakat yang sehat, cerdas dan responsif.
2. Masyarakat Kecamatan Padang Panjang Timur yang aman adalah masyarakat yang inovatif, tangguh dan berdaya saing.
3. Masyarakat Kecamatan Padang Panjang Timur yang Sejahtera adalah masyarakat yang memiliki kualitas kehidupan social ekonomi yang lebih baik
4. Penanganan masalah penyakit masyarakat dan gangguan Katibmas dengan mengoptimalkan keberadaan Siskamling.

B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran Visi dan Misi Kecamatan Padang Panjang Timur yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi

dengan rencana sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dari Rencana Strategi Kecamatan Padang Panjang Timur diperoleh dari hasil analisis silang antara faktor-faktor kunci keberhasilan dengan Misi.

Hasil analisis silang tersebut yang kemudian menghasilkan tujuan Strategis adalah sebagai berikut :

MISI 1

✓ *Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang baik dan bersih.*

Tujuan yang ingin dicapai :

1. Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas bernuansa Islami.
2. Meningkatkan kualitas aparatur kecamatan yang akuntabel dan responsif.
3. Meningkatkan koordinasi yang jelas, terarah dan berkesinambungan dengan instansi / pihak terkait.

Sasaran yang ingin dicapai :

1. Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dan bernuansa Islami dengan meningkatkan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintah dan penyediaan kotak pengaduan di Kecamatan Pd.Panjang Timur.
2. Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.
3. Meningkatnya koordinasi yang jelas, terarah dan berkesinambungan dengan instansi terkait.

MISI 2

✓ *Mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan yang partisipatif.*

Tujuan yang ingin dicapai :

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan yang partisipatif.
2. Meningkatkan pengelolaan pembangunan dengan berwawasan lingkungan.

3. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan.

Sasaran yang ingin dicapai :

1. Meningkatnya hubungan antara masyarakat dengan pemerintah dalam setiap proses pembangunan dengan meningkatnya jumlah peserta musrenbang dan usulan yang tertampung dalam RKPD dan APBD.
2. Meningkatnya pengelolaan pembangunan berwawasan lingkungan.
3. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan yang partisipatif .

MISI 3

- ✓ *Mewujudkan pemberdayaan potensi kecamatan berbasis sumber daya lokal.*

Tujuan yang ingin dicapai :

1. Meningkatkan pengembangan sentra ekonomi Kelurahan yang berbasis masyarakat.
2. Meningkatkan lembaga ekonomi masyarakat Kelurahan yang berkualitas.
3. Meningkatkan pemberdayaan potensi sumber daya yang tersedia dengan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna di setiap kelurahan.

Sasaran yang ingin dicapai :

1. Meningkatnya pengembangan sentra-sentra ekonomi Kelurahan yang berbasis masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas lembaga ekonomi masyarakat Kelurahan.
3. Meningkatnya pemberdayaan potensi sumber daya yang tersedia dengan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna di setiap kelurahan.

MISI 4

✓ *Tercipta dan terpelihara serta pengembangan kondisi social politik dan Kamtibmas yang kondusif*

Tujuan yang ingin dicapai :

Menrciptakan dan memelihara serta mengembangkan kondisi social politik dan Kamtibmas yang kondusif

Sasaran yang ingin dicapai :

1. Terciptanya keamanan masyarakat dengan menurunnya jumlah gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah Kecamatan Padang Panjang Timur
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengelola kamtibmas yang diindikasikan dengan pelaksanaan Siskamling di Kelurahan.

B.1. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Yang dimaksud kebijakan adalah keputusan politik Pemerintah Kecamatan Padang Panjang Timur guna mengarahkan orientasi program agar dicapai hasil yang maksimal. Sedangkan strategi adalah cara-cara yang dipakai oleh Padang Panjang Timur untuk mewujudkan program-program yang telah memperoleh pendanaan dari sumber APBD maupun dana lainnya Adapun kebijakan dan strategi Kecamatan Padang Panjang Timur yang dapat dilaksanakan :

B.1.1. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN UNTUK MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN YANG BAIK DAN BERSIH.

A. Strategi :

- a. Optimalisasi Pengelolaan keuangan yang akuntabel

- b. Meningkatkan kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan.
- c. Penyelenggaraan pelayanan public yang baik dan bernuansa islami
- d. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang jelas dan berkesinambungan dengan pihak terkait.

B. Kebijakan :

- a. Peningkatan Pelayanan public yang bernuansa islami dan sesuai standar (cepat, tepat dan mudah).
- b. Peningkatan kualitas aparatur Kecamatan yang akuntabel dan responsive serta bebas korupsi, kolsi dan nepotisme.
- c. Peningkatan koordinasi yang jelas, terarah dan berkesinambungan dengan instansi / pihak terkait.

B.1.2. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DALAM MEWUJUDKAN PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN YANG PARTISIPATIF.

A. Kebijakan :

- a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam setiap proses pelaksanaan pembangunan.
- b. Peningkatan kerjasama dengan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
- c. Peningkatan pembinaan dan pengembangan peran serta perempuan dalam kegiatan pembangunan yang partisipatif.

B. Strategi

- a. Optimalisasi dukungan dan partisipatif masyarakat dalam pembangunan.

- b. Penguatan kelembagaan masyarakat yang ada.
- c. Pengembangan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.
- d. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pelatihan bagi perempuan dalam pengembangan industri rumah tangga.

B.1.3. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DALAM MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN POTENSI KECAMATAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL.

A. Kebijakan :

- a. Peningkatan pengembangan sentra ekonomi kelurahan yang berbasis masyarakat.
- b. Peningkatan lembaga ekonomi masyarakat yang berkualitas.
- c. Peningkatan pemberdayaan potensi sumber daya yang tersedia dengan memanfaatkan teknologi tepat guna di setiap kelurahan.

B. Strategi :

- a. Memfasilitasi pengembangan sentra ekonomi kelurahan yang berbasis masyarakat.
- b. Menumbuh kembangkan sentra ekonomi kelurahan yang berbasis masyarakat agar mampu berdaya saing.
- c. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pelatihan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengembangan usaha ekonomi kemasyarakatan.

B.1.4. KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM MENCIPTAKAN, MEMELIHARA DAN MENGEMBANGKAN KONDISI SOSIAL POLITIK DAN KAMTIBMAS YANG KONDUSIF

A. Kebijakan :

- a. Menciptakan dan memelihara keamanan lingkungan

- b. Mengembangkan kondisi social politik dan Katibmas yang kondusif
- c. Mengelola pelaksanaan Siskamling di Kelurahan

B. Strategi :

- a. Penanganan masalah strategi dan rawan konflik
- b. Penanganan masalah penyakit masyarakat dan gangguan Katibmas
- c. Mengoptimalkan keberadaan Siskamling di Kelurahan

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
Meningkatnya pelayanan public yang berkualitas dan bernuansa islami	% Pelayanan yang sesuai prosedur	1 Kali	Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	51.900.000
			Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan ISO 9001:2015	51.900.000
			Program : Peningkatan Sumber Daya Apartatur	83.748.250
			Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundan-Undangan	53.000.000
			Kegiatan : Kompetensi Sekretaris Lurah	6.762.500
			Kegiatan : Kompetensi Pelayanan Publik Kelurahan	7.185.000
			Kegiatan : Optimalisasi Pelayanan	16.800.750
Meningkatnya Koordinasi yang jelas terarah dan berkesinambungan dengan Instansi terkait.	Jumlah rapat koordinasi tentang Kamtibmas	4 Kali	Program : Peningkatan Pelayanan Kedinasan Camat	33.0100.00
			Kegiatan : Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan tentang Masalah Kedinasan Kamtibmas di Kecamatan	18.060.000
			Kegiatan : Monitoring dan Pengawasan Perda yang Berkaitan Ketentraman dan Ketertiban	14.950.000
Meningkatnya hubungan antara Masyarakat dengan Pemerintah dalam setiap proses Pembangunan.	Jumlah peserta Musrenbang	100%	Program : Perencanaan Pembangunan Daerah	89.601.500
			Kegiatan : Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	17.451.500
			Kegiatan : Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	72.150.000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
		8 Kel	Program : Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kegiatan : Penunjang Kegiatan Tim Ramadhan Program : Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan : Peningkatan Keadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	37.400.000 37.400.000 47.710.000 47.710.000
Meningkatkan peran masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan yang berwawasan lingkungan & kesehatan.	Terlaksananya koordinasi dan pendistribusian Raskin. Terlaksananya Forum Komunikasi Kecamatan Sehat	8 Kel 1 Kali	Program : Pemberdayaan Fakir Miskiin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Lainnya Kegiatan : Fasilitasi Penyaluran Raskin Bagi Keluarga Miskin Program : Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) Kegiatan : Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Program : Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kegiatan : Operasional Persampahan, Pengawasan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	65.750.000 65.750.000 21.425.000 20.760.4000 975.050.000 975.050.000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
			Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1.198.739.000
			Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penilaian Kelurahan Berprestasi	15.422.500
			Kegiatan : Lomba Kader Posyandu	15.422.500
			Kegiatan : Lomba Kader Dasawisma	17.425.000
			Kegiatan : Lomba Hari Kesatuan Gerak PKK KB Kes	21.675.000
			Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan / Pedesaan Melalui Kegiatan LPM	77.694.000
			Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan / Pedesaan Melalui Kegiatan RT	1.051.200.000
Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan yang partisipatif.	Terlaksananya kegiatan PKK di Kecamatan & Kelurahan	8 Kel	Program : Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	449.611.500
			Kegiatan : Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	449.611.500

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Capaian Kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan Capaian Kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (Performa Plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (Performance Result) selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (Performance Gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan dimasa akan datang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dari 5 (Lima) sasaran yang merupakan sasaran stratejik yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2014, dimana semua sarasan tersebut telah didukung dengan program dan kegiatan pendukung.

Secara umum semua sasaran yang telah ditargetkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2017 telah berhasil dicapai.

Persentase hasil capaian dikelompokkan dalam 5 klasifikasi penilaian yaitu :

- Pencapaian Indikator Kinerja sasaran $\geq 100\%$ “ Memuaskan”
- Pencapaian Indikator Kinerja sasaran $85\% \leq < 100\%$ “Sangat Baik”
- Pencapaian Indikator Kinerja sasaran $70\% \leq < 85\%$ “Baik”
- Pencapaian Indikator Kinerja sasaran $55\% \leq < 70\%$ “Cukup”
- Pencapaian Indikator Kinerja sasaran $0\% \leq < 55\%$ “Kurang”

Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dan bernuansa Islami.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dan bernuansa Islami, dengan 1(satu) Indikator Kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 97,09% dengan predikat Sangat Baik.

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dan bernuansa Islami sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2016 (Rp.)	Tahun 2017		
			Target (%)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1.	Kompetensi pelayanan publik kelurahan	37.150.000,-	100	6.975.975.-	97,09

Pencapaian indikator kinerja sasaran diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- Jumlah Peserta 8 Kelurahan yang terdiri dari Kelurahan se Kecamatan Padang Panjang Timur

Sasaran 2 : Meningkatnya Koordinasi yang jelas terarah dan berkesinambungan dengan Instansi terkait

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Koordinasi yang jelas terarah dan berkesinambungan dengan Instansi terkait, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 98,17 % dengan predikat sangat baik.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Koordinasi yang jelas terarah dan berkesinambungan dengan Instansi terkait sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2016 (Rp.)	Tahun 2017		
			Target (%)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1.	Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan tentang masalah ke-dinasan Kamtibmas di Kecamatan.	21.985.400,-	4 Kali	17.841.200.-	98,79

Pencapaian indikator kinerja sasaran diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- Jumlah Forum Koordinasi Pimpinan sebanyak 20 orang yang terdiri dari seluruh Muspika pada Kecamatan Padang Panjang Timur dan Pegawai Negeri Sipil pada Kecamatan Padang Panjang Timur.

Sasaran 3 : Meningkatnya hubungan antara Masyarakat dengan Pemerintah dalam setiap proses Pembangunan.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya hubungan antara Masyarakat dengan pemerintah dalam setiap proses Pembangunan, dengan 5(lima) Indikator Kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 95,93% dengan predikat sangat Baik.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya hubungan antara Masyarakat dengan Pemerintah dalam setiap proses Pembangunan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2016 (Rp.)	Tahun 2017		
			Target (%)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1.	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	69.134.300,-	100	83.823.600.-	95,93

Pencapaian indikator kinerja sasaran diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- Jumlah Peserta Musrenbang se Kecamatan Padang Panjang Timur sebanyak 8 Kelurahan yang terdiri dari seluruh SKPD,Muspika, Fasilitator, Delegasi, dan Masyarakat Kecamatan Padang Panjang Timur.

Sasaran 4 : Meningkatkan peran Masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan yang berwawasan lingkungan dan kesehatan.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan peran Masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan yang berwawasan lingkungan dan kesehatan 1 (Satu) Indikator Kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 89,79% dengan predikat sangat baik.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatkan peran Masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan yang berwawasan lingkungan dan kesehatan, sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2016 (Rp.)	Tahun 2017		
			Target (%)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1.	Terlaksananya Penyaluran Raskin bagi Keluarga Miskin.	48.712.000,-	8 Kel.	59.040.000,-	89,79

Pencapaian indikator kinerja sasaran diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- Terlaksananya Penyaluran Raskin bagi Keluarga Miskin se Kecamatan Padang Panjang Timur.

Sasaran 5 : Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan yang partisipatif

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan yang partisipatif 1 (satu) Indikator Kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 82,34% dengan predikat Baik.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan yang partisipatif sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2016 (Rp.)	Tahun 2017		
			Target (%)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1.	Terlaksananya kegiatan PKK di Kecamatan & Kelurahan.	290.913.225	8 Kel.	370.193.269	82,34

Pencapaian indikator kinerja sasaran diatas dapat diuraikan sebagai berikut

- Terlaksananya Kegiatan PKK di Kecamatan dan Kelurahan.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017

Berdasar perjanjian kerja Tahun 2017 ada 5 (lima) sasaran yang ingin dicapai, dengan analisis kinerja seperti tabel berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dan bernuansa Islami.

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Meningkatnya pelayanan public yang berkualitas dan bernuansa islami	Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan ISO 9001	51.900.000 51.900.000	51.600.000 51.600.000	99.42 99.42

Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi yang jelas terarah dan berkesinambungan dengan Instansi terkait.

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
2.	Meningkatnya koordinasi yang jelas, terarah dan berkesinambungan dengan instansi terkait.	Program : Pelayanan Kedinasan Camat Kegiatan : Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan tentang Masalah Kamtibmas di Kecamatan Kegiatan : Monitoring dan Pengawasan Perda yang Berkaitan Ketentraman dan Ketertiban	33.010.000 18.060.000 14.950.000	17.841.200 17.841.200 0	93.16 49.40 0

Sasaran 3 : Meningkatnya hubungan antara Masyarakat dengan pemerintah dalam setiap proses Pembangunan

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
3.	Meningkatnya hubungan antara masyarakat dan pemerintah dalam setiap proses pembangunan	Program : Perencanaan Pembangunan Daerah	89.601.500	83.402.900	95.92
		Kegiatan : Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	89.601.500	83.402.900	95.92
		Program : Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	37.400.000	34.577.000	92.45
		Kegiatan : Penunjang Kegiatan Tim Ramadhan	37.400.000	34.577.000	92.45
		Program : Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	47.710.000	46.158.000	96.75
Kegiatan : Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	47.710.000	46.158.000	96.75		

Sasaran 4 : Meningkatkan peran Masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan yang berwawasan lingkungan dan kesehatan

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
4.	Meningkatkan peran masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan yang berwawasan lingkungan dan kesehatan	Program : Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Lainnya	65.750.000	59.040.000	89.79
		Kegiatan : Fasilitas Penyaluran Raskin Bagi Keluarga Miskin	65.750.000	59.040.000	89.79
		Program : Upaya Kesehatan Masyarakat	21.425.000	20.760.400	96.90
		Kegiatan : Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	21.425.000	20.760.400	96.90
		Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1.198.739.000	1.147.825.750	76.61
		Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penilaian Kelurahan Berprestasi	15.422.500	10.324.350	66.94
		Kegiatan : Lomba Kader Posyandu	15.422.500	14.139.300	91.68
		Kegiatan : Lomba Kader Dasawisma			

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		Kegiatan : Lomba Hari Kesatuan Gerak PKB Kes	21.675.000	17.105.400	78.92
		Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga/Organisasi Masyarakat Melalui Kegiatan RT	1.051.200.000	1.050.800.000	99.96
		Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga/Organisasi Masyarakat Melalui Kegiatan LPM	77.594.000	44.055.700	56.78

Sasaran 5 : Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan yang partisipatif

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
5.	Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan yang partisipatif	Program : Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	449.611.500	370.193.269	82.34
		Kegiatan : Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	449.611.500	370.193.269	82.34

C. ANALISIS ATAS PENCAPAIAN KEUANGAN TAHUN 2017

Berdasar perjanjian kerja Tahun 2017 ada 5 (Lima) sasaran yang ingin dicapai, dengan analisis keuangan seperti tabel berikut :

No	Sasaran	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Bernuansa Islami	51.900.000,-	51.600.000,-	99,42
2	Meningkatkan Koordinasi yang jelas terarah dan Berkesinambungan dengan Instansi terkait	33.010.000,-	17.841.200,-	49,39
3	Meningkatkan hubungan antara Masyarakat dengan Pemerintah dalam setiap proses Pembangunan	89.601.500,-	83.823.600,-	95,92
4	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan yang berwawasan lingkungan dan Kesehatan	65.750.000,-	59.040.000,-	89,79
5	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan yang partisipatif	449.611.500,-	370.193.269,-	82,34

Berdasarkan program Kecamatan mempunyai 20 (dua puluh) program kegiatan dengan analisis keuangan seperti tabel berikut :

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Pelayanan Administrasi perkantoran :	2.535.622.500,-	2.120.705.807,-	79,36
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	406.411.290,-	349.766.227,-	56,67

3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	83.748.250,-	83.010.425,-	98,98
4	Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Kinerja dan Keuangan	1.300.000,-	1.126.800,-	87,16
5	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.600.000,-	2.128.500,-	32,25
6	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Camat	33.010.000,-	17.841.200,-	49,40
7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	51.900.000	51.600.000,-	99,42
8	Upaya Kesehatan Masyarakat	21.425.000,-	20.760.400,-	96,90
9	Perencanaan Pembangunan Daerah	89.601.500,-	83.823.600,-	95,93
10	Peberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpenci (KAT) dan penyandang masakah kesejahteraan sosial (PMKS)	65.750.000,-	59.040.000,-	89,79
11	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	37.400.000,-	34.577.000,-	92,45
12	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	47.710.000,-	46.158.000,-	96,75
13	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1.198.739.000,-	1.147.825750,-	97,58
14	Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	449.611.500,-	370.193.269,-	82,34
15	Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	1.949.775.800,-	895.468.210,-	43,54
16	Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	985.276.000,-	975.050.000,-	98,96

17	Pengembangan Lingkungan Sehat	9.900.000,-	4.209.000,-	42,52
18	Pemberdayaan FKPM Kecamatan dan Kelurahan	131.955.000,-	39.700.200,-	30,09
19	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	13.175.000,-	7.737.800,-	58,73
20	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	171.420.000,-	171.420.000,-	100

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara umum seluruh kegiatan sudah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.
2. Dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan telah mencapai pada tingkat out put yang diharapkan di segi kuantitas, namun dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan secara berkesinambungan dimasa mendatang.
3. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Camat Padang Panjang Timur realisasi keuangannya mengalami penghematan namun berhasil mencapai target fisik 100 %, ini mengindikasikan bahwa Kantor Camat Padang Panjang Timur menyadari bahwa maksud dan tujuan dari Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih (Good Governance) seperti yang diinginkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang yang juga sedang mengupayakan terwujudnya Pemerintah yang akuntabel.

B. Saran

Demikianlah beberapa hal yang dapat disampaikan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2017 diharapkan laporan ini kiranya dapat menjadi bahan bagi referensi dan acuan penyelenggaraan Pemerintah dimasa mendatang.

Padang Panjang, 12 Januari 2018
CAMAT PADANG PANJANG TIMUR

DONI RAHMAN,S.Pdi
NIP. 19780720 200604 1 012

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

(L K j i p)



**KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2017**